Ikatan Guru Indonesia
Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia
Sekretariat: Graha Wiranesia, Jalan Kp. Utan No. 37-38,
Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540
Posel: info@igi.or.id | Laman: www.igi.or.id

SIARAN PERS

Jakarta, 24 November 2026

Sambut Hari Guru Nasional 2026, IGI Desak Pemerintah Akhiri Diskriminasi Status dan Kesejahteraan Pendidik PAUD

JAKARTA, 24 November 2026 - Menjelang peringatan Hari Guru Nasional (HGN) ke-32 pada 25 November 2026 yang mengusung tema nasional "Guru Hebat, Indonesia Kuat", Ikatan Guru Indonesia (IGI) menyerukan kepada pemerintah dan DPR RI untuk menjadikan momentum ini sebagai titik balik pengakuan status dan peningkatan kesejahteraan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

IGI menilai tema besar HGN 2026 belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi ratusan ribu pendidik PAUD di jalur nonformal-seperti Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Hingga kini, pemberlakuan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen masih membatasi pengakuan profesi "guru" hanya pada satuan pendidikan formal.

Akibat ketimpangan regulasi tersebut, pendidik PAUD nonformal kehilangan akses terhadap Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi profesi, maupun Tunjangan Profesi Guru (TPG).

"Kita selalu menyebut PAUD sebagai fondasi utama generasi emas karena 80 hingga 90 persen perkembangan otak anak terjadi di usia dini. Namun faktanya, penjaga fondasi tersebut masih dibedakan statusnya dan mayoritas hanya menerima honor Rp250.000 hingga Rp500.000 per bulan. Cita-cita Guru Hebat, Indonesia Kuat tidak akan kokoh jika guru PAUD-nya masih terpinggirkan," tegas Danang Hidayatullah, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) dalam keterangan resminya, Selasa (24/11/2026).

Data pendidikan nasional mencatat hampir 48 persen dari sekitar 637 ribu pendidik PAUD di Indonesia belum memiliki kualifikasi akademik S1/D4. Menurut IGI, rendahnya penghasilan bulanan membuat para pendidik tersebut mustahil membiayai kuliah secara mandiri tanpa intervensi negara, sementara alokasi anggaran sektor PAUD secara nasional masih berada di bawah 2 persen dari total anggaran pendidikan.

Melalui pernyataan sikap resmi HGN 2026, IGI mengajukan lima desakan utama kepada pemangku kebijakan:

- Revisi Regulasi Pendidikan: Menghapus dikotomi guru formal dan nonformal dalam revisi UU Sisdiknas maupun UU Guru dan Dosen agar seluruh pendidik PAUD yang kompeten diakui secara setara sebagai guru profesional.

- Akses PPG Inklusif: Membuka peluang seluas-luasnya bagi pendidik PAUD nonformal lulusan S1/D4 untuk mengikuti PPG dalam jabatan dan menerima tunjangan profesi.

- Perluasan Beasiswa RPL: Memperbesar kuota beasiswa penuh dan gratis melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk menuntaskan kualifikasi S1/D4 bagi pendidik PAUD.

- Standar Upah Manusiawi: Menaikkan porsi anggaran PAUD dan menetapkan standar penghasilan bulanan yang layak serta bebas dari potongan yang merugikan guru.

- Pelibatan Organisasi Profesi: Melibatkan organisasi profesi guru sebagai mitra strategis dalam merumuskan kebijakan tata kelola guru PAUD.

"Hadiah terbaik pada Hari Guru Nasional 25 November 2026 bukanlah panggung seremoni, melainkan keberanian negara menghadirkan keadilan regulasi dan kesejahteraan yang layak bagi seluruh pendidik PAUD di Indonesia," tutup Danang Hidayatullah, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI)